

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara-negara muslim mulai mengenal sistem perbankan modern pada akhir abad ke-19. Bank-bank yang terkemuka yang berpusat di negara-negara kolonial-kolonialnya. Terutama untuk melayani keperluan impor ekspor perusahaan-perusahaan asing pada umumnya bank-bank itu didirikan di kota-kota besar pada sebagian besar penduduk sama sekali tidak mengenal sistem perbankan. Para pedagang pribumi menghindari bank-bank asing itu karena alasan nasionalisme dan juga agama namun seiring berjalannya waktu aktifitas perdagangan semakin tidak bisa melepaskan diri dari layanan bank komersial. Pada akhirnya banyak dari mereka yang mempergunakan jasa bank. Meski hanya menggunakan layanan-layanan transaksi seperti rekening lancar dan transfer uang pada umumnya mereka enggan menabung atau meminjam dari bank karena menghindari transaksi berbunga.¹

Berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1992 sebagai mana telah diubah dengan undang-undang No. 10 tahun 1998, Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut tersebut juga memberikan arahan bagi

¹ Marvyn K. Lewis & Latifa M. Alguat, *Perbankan Syariah Prinsip, Karakter, dan Prospek*, Jakarta: PT. Ikrar mandiri abadi, 2007, hlm. 161AAAA

bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.²

Secara garis besar bank syariah dibagi menjadi dua yaitu Bank Islam komersial (islamic komercial bank) dan lembaga investasi. Pada tahun 1970-an negara islam telah banyak yang mendirikan lembaga keuangan syariah, seperti Mesir , Sudan, Dubai, Pakistan, Iran, Turki, Bangladesh, Malaiysa dan termasuk Indonesia pada dekade 1990-an.

Sedangkan di indonesia, pembicaraan bank syariah sudah dimulai sejak tahun 1980-an. Namun prakarsanya lebih khusus dimulai sejak 1990. Dimulai dari adanya lokakarya bunga bank dan perbankan yang diselenggarakan pada tanggal 18-20 Agustus 1990 oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Hasil lokakarya tersebut dilanjutkan dan dibahas lebih lanjut dalam musyawarah nasional IV (MUNAS IV) MUI tanggal 22-25 agustus 1990 di hotel sahid jaya jakarta. Hasil munas membentuk tim perbankan MUI yang bertugas mensosialisasikan rencana pendirian bank syariah di Indonesia.

Hasil kerja tim ini membuahkan hasil yang cukup menggembirakan, Yakni yang berhasil mendirikan Bank Muamalah Indonesia (BMI) pada tanggal 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada september 1992. Meskipun pada pendiriannya BMI belum mendapatkan perhatian yang cukup, Baik dari pemerintahan maupun industri perbankan, Namun keberadaannya telah menorehkan sejarah yang sangat baik dalam perbankan nasional. Keberhasilannya

² M. Syafi'i Antonio, *Bank syariah dari teori ke praktek*, Jakarta : Gema insani, 2001. Hlm 27.

untuk terus tumbuh dan berkembang serta selamat dari badai krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, Telah mengilhami pemerintah untuk memberikan perhatian yang cukup dan mengaturnya secara lebih luas dalam undang-undang, Serta memacu segera berdirinya bank-bank syariah yang lain baik dalam bentuk Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) maupun bank umum.

Sesungguhnya terdapat jenis lembaga keuangan lain di luar perbankan. Lembaga ini sama-sama memiliki misi keumatan. Sistem operasionalnya menggunakan syariah islam, hanya produk dan menejemannya sedikit berbeda dengan industri perbankan. Lembaga tersebut meliputi ; Asuransi Syariah, Reksa dana Syariah serta Baitbutul Mall Wa Tamwil. Untuk memberikan pelayanan lebih luas kepada masyarakat bawah, di bentuk Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Nama pengkreditan sesungguhnya tidak tepat, karena bank islam tidak melayani pengkreditan tetapi pembiayaan, sehingga penggunaan nama harus dipertimbangkan. Istilah pengkreditan menjadikan nama pembiayaan menjadi kabur. Harapan kepada BPRS, Menjadi sangat besar, mengingant cakupan bisnis bank ini lebih kecil. Namun sungguhpun demikian, dalam realitasnya sungguh demikian BPRS jug terjebak pada pemusatan kekayaan hanya pada segelintir orang, yakni para pemilik modal.

Dari persoalan ini mendorong munculnya lembaga keuangan syariah alternatif. Yakni sebuah lembaga yang tidak hanya berorientasi pada bisnis tetapi juga sosial. Lembaga tersebut adalah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, Tidak ada batasan ekonomi, Sosial bahkan agama, Semua komponen masyarakat

dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun.³

Baitul Maal Wa tamwil (BMT) terdiri dari 2 istilah, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit. Sedangkan Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Maka dari istilah BMT dapat diartikan sekelompok orang yang menyatukan diri untuk saling membantu dan bekerja sama membangun sumber pelayanan keuangan guna mendorong dan mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan taraf hidup para anggota dan keluarga.⁴

Disamping berdirinya BMT juga dikarenakan kehidupan masyarakat yang serba kecukupan, Sehingga akan timbul pengikisan aqidah yang juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Oleh karena itu BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini. Dengan keadaan tersebut keberadaan BMT mempunyai peran yaitu menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah serta melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil atau masyarakat menengah kebawah.

BMT Walisongo Papandayan Semarang berdiri sejak tahun 1999 merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan

³ Muhammad ridwan. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, yogyakarta : UII Press, 2004 Hlm. 73.

⁴ Heri sudarsono, *Bank dan lembaga keuangan syariah (deskripsi dan ilustrasi)*, Yogyakarta : ekonisia, 2003, hlm. 96.

menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Hal utama yang membedakannya dengan bank konvensional adalah dalam cara menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

BMT Walisongo papandayan semarang menyediakan produk-produk Sdiantaranya adalah: simpanan SIRELA(Simpanan sukarela) SIRELA JUNIOR (Simpanan sukarela junior) SIDIDIK (simpanan pendidiakan) SISUQUR (simpanan Qurban) SIHARA (Simpanan Hari raya) SISUKA (simpanan sukarela berjangka).Sedangkan produk pembiayaan adalah pembiyaan mudhorobah (MDA) pembiayaan musyarokah (MSA) pembiayaan bai bitsaman ajil (BBA) pembiayaan murobahah (MBA).⁵

Dari uraian diatas penulis tertarik melakukan studi tentang produk SISUKA di koppontren walisongo sebagai obyek penulisan tugas ahir dengan mengangkat judul “ PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA SIMPANAN SISUKA DI BMT WALISONGO PAPANDAYAN SEMARANG ”

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana perhitungan bagi hasil pada simpanan SISUKA di BMT Walisongo papandayan Semarang,?

⁵ Brosur BMT Walisongo Papandayan Semarang.

1.3. Tujuan penelitian

Dalam penyusunan tugas akhir ini ada tujuan yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana teknik penghitungan bagi hasil simpanan sisuka di BMT Walisongo Papandayan Semarang.

1.4. Manfaat

1. Bagi peneliti.
 - a) Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penghitungan bagi hasil simpanan SISUKA di BMT Walisongo Papandayan Semarang.
 - b) Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya pada fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo (IAIN) Semarang.
2. Bagi BMT.

Penelitian ini dapat memperkenalkan simpanan pada masyarakat luas sehingga dapat memberikan informasi dan pengetahuan tambahan.

3. Bagi IAIN Walisongo.

Sebagai tambahan referensi dan informasi, khususnya bagi akademisi mengenai perhitungan bagi hasil pada simpanan.

4. Bagi Masyarakat.

Sebagai wahana informasi bagi masyarakat tentang operasional BMT Walisongo Papandayan Semarang, Khususnya mengenai perhitungan bagi hasil pada simpanan.

1.5. Metode Penelitian

1. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan.⁶ Data primer diperoleh melalui dokumen di BMT dan wawancara dengan pihak BMT Walisongo Papandayan Semarang. Dengan ini penulis mendapatkan gambaran umum tentang BMT Walisongo Papandayan Semarang.

b. Data skunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.⁷ Data sekunder yang didapat berupa formulir, brosur, dan modul tentang produk BMT Walisongo Papandayan Semarang.

2 .Metode Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan topik penelitian tersebut maka digunakan beberapa metode yaitu :

a. Observasi

⁶Burhan Ashshofa, SH, *Metode Penelitian Hukum*, jakarta, PT.Rineka Cipta, 1996, hlm.103.

⁷ Saifuddin Azwar, MA, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, 1998, hlm. 91.

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.⁸Yaitu dengan cara mengamati suasana kerja secara langsung di BMT Walisongo Papandayan Semarang serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan tentang penghitungan bagi hasil pada simpanan sisuka di BMT Walisongo Papandayan Semarang.

b. Wawancara.

Wawancara adalah merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu⁹, yaitu dengan tanya jawab kepada bagian-bagian yang terkait dengan tema yang diangkat di BMT Walisongo Papandayan Semarang, hal ini dilakukan tidak terjadi penyimpangan atau salah pengertian mengenai permasalahan yang diangkat.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data relevan melalui arsip-arsip, catatan-catatan, brosur-brosur, pendapat-pendapat dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Metode Analiais Data

Analisis data yang digunakan dalam melakukan penelitian yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif, yang apabila datanya telah terkumpul,

⁸ Drs.Muchlis Yahya,M.si, *Dasar-Dasar penelitian Metedologi dan Amplikasi*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2010, hlm. 122.

⁹ Burhan ashshofa, S H, *Metode Penelitin Hukum*, Jakarta, PT.Rineka Cipta, Cet. Ke-1, 1996, hlm.95.

maka diklasifikasikan menjadi data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau simbol. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis. Catatan hasil observasi, wawancara, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.

Data kualitatif tidak berdasarkan pada angka-angka atas perhitungan-perhitungan akan tetapi berupa keterangan, pendapat, dan pandangan pemikiran yang dapat menunjang kesimpulan yang diinginkan.

1.6. Sistematik penulisan

Sistematika pembahasan berguna untuk memudahkan proses kerja dalam penyusunan tugas akhir ini serta untuk mendapatkan gambaran dan arah penulisan yang baik dan benar. Secara garis besar tugas akhir ini dibagi menjadi 4 bab yang masing-masing terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menerangkan latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penulisan, Metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM BMT WALISONGO PAPANDAYAN SEMARANG

Dalam bab ini menguraikan mengenai sejarah singkat berdirinya BMT Walisongo Papandayan Semarang, visi, misi, tujuan BMT Walisongo Papandayan Semarang, Produk-produk yang dimiliki BMT Walisongo Papandayan Semarang dan stuktur

organisasi serta Perkembangan BMT Walisongo Papandayan Semarang.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan bagaimana cara bagi hasil pada simpanan sisuka yang meliputi: pengertian simpanan sisuka, akad yang digunakan dalam simpanan sisuka, prosedur simpanan sisuka, perhitungan bagi hasil, Analisis perhitungan bagi hasil menurut hukum islam, Analisis

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran